

PENDAMPINGAN PENGUKURAN INDIKATOR TATAKELOLA EGOVERMENT DI DESA PABEAN UDIK KABUPATEN INDRAMAYU

Kraugusteeliana Kraugusteeliana¹, Anita Muliawai², Erly Krisnanik³, Intan Hesti Indriana⁴

^{1,2,3}) Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴) Program Studi Diploma Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: kraugusteeliana@upnvj.ac.id¹, anitamuliawati@upnvj.ac.id², e-krisnanik@upnvj.ac.id³,

hesti@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Pemerintah Indonesia mencanangkan pelayanan terhadap Masyarakat yang bersih dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelayanan yang baik secara 24 jam melalui sistem atau aplikasi yang ada di pemerintahan. Pemerinkatan Pegi atau Pemerinkatan Egoverment di Indonesia dapat menjadi salah satu indicator pencapaian suatu daerah dalam memberikan pelayanan yang baik. Tim Pkm PPDL telah melakukan kegiatan sosialisasi pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 ini akan dilakukan workshop dan FGD untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik melalui pengukuran pemerinkatan tata Kelola pemerintahan. Kegiatan ini akan melibatkan aparat pemerintahan di desa sebagai percontohan dalam pengabdian Masyarakat ini menjadikan desa pabean udik di Indramayu sebagai pilot project. Berdasarkan hasil kegiatan telah banyak kemajuan dan penyiapan dokumen yang dilakukan aparatur pemerintah desa sehingga beberapa indicator sudah terpenuhi namun untuk indicator infrastruktur masih perlu diperbaiki dengan hasil penilaian masih dibawah nilai 3 yaitu 2,64. Sedangkan untuk penilaian indicator dimensi kebijakan, kelembagaan, dimensi aplikasi dan dimensi perencanaan berdasarkan hasil self assessment menunjukkan nilai tertinggi didapat pada indicator dimensi Perencanaan yang sangat baik dengan nilai 4.71 dari skala 5.

Kata kunci: PeGI, Pendampingan, Desa Pabean Udik, Egoverment, Self Asesment

Abstract

The Indonesian government has launched a clean and transparent service to society. This can be done with good service 24 hours a day through government systems or applications. Pegi ranking or government ranking in Indonesia can be an indicator of a region's achievement in providing good services. The Pkm PPDL team has carried out outreach activities in 2022 and in 2023 workshops and FGDs will be held to measure the readiness of regional governments to provide the best service through measuring government governance rankings. This activity will involve government officials in the village as a pilot in this community action, making the customs village in Indramayu a pilot project. Based on the results of the activities, there has been a lot of progress and preparation of documents carried out by village government officials so that several indicators have been met, but the infrastructure indicators still need to be improved with the assessment results still below the value of 3, namely 2.64. Meanwhile, for the assessment of indicators for the policy, institutional, application dimensions and planning dimensions, based on the results of the self-assessment, the highest score was obtained for the very good planning dimension indicator with a score of 4.71 on a scale of 5.

Keywords: PeGI, Mentoring, Udik Customs Village, Egoverment, Self Assessment

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mencanangkan pelayanan terhadap Masyarakat yang bersih dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelayanan yang baik secara 24 jam melalui sistem atau aplikasi yang ada di pemerintahan. Pemerinkatan Pegi atau Pemerinkatan Egoverment di Indonesia dapat menjadi salah satu indicator pencapaian suatu daerah dalam memberikan pelayanan yang baik. Tim pengabdian Masyarakat melaksanakan Pengabdian masyarakat dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah (PPDL) di Indramayu telah memasuki tahun ke dua yang merupakan lanjutan dari program sebelumnya pada tahun 2022.

Adapun permasalahan dari kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan tahun 2022 masih ada staf yang belum paham terkait pemerinkatan egoverment di pemerintahan serta masih banyak indicator penilaian yang belum dimiliki oleh pemerintahan indramayu dalam hal ini sebagai pilot project percontohan desa pabean udik. Untuk itu pada kegiatan PPDL saat ini untuk melakukan pendampingan dan pengukuran serta evaluasi pemenuhan kesiapan pemerintah indramayu dalam

rangka pemeringkatan egovernment. Untuk itu pada pendampingan tahun 2023 akan diukur kesiapan desa pabean udik dan Tim serta Aparatur daapt mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan serta melakukan evaluasi pengukuran penilaian atas ketersediaan dokumen dan aplikasi dalam rangka pemeringkatan egovernment.

Kegiatan akan berlangsung sebanyak 2 kali pendampingan dan 1 kali untuk melakukan pengukuran dengan jeda waktu per 2 bulan, sehingga akan terlihat progress report dari setiap pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian UPNVJ. Pendampingan Pelaksanaan tata kelola e-government ini dapat meningkatkan layanan pemerintah yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan interaksi dan hubungan dengan bisnis serta industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau menjadikan manajemen pemerintahan lebih efisien. Harapannya melalui pendampingan serta pengukuran pemeringkatan tata Kelola dapat memperbaiki kekurangannya dan hasil pengukuran menjadi acuan perbaikan agar memberikan dampak signifikan persiapan terhadap pemeringkatan yang sebenarnya yang akan dinilai oleh pemerintah pusat.

METODE

Tim Pengabdian masyarakat skema PPDL melakukan FGD dan sosialisasi kepada aparaturnya terkait bagaimana desa pabean udik dapat perbaikan tata kelola TIK dan egovernment untuk menjadi salah satu desa yang memberikan pelayanan terbaik melalui kesiapan dalam pemeringkatan egovernment di indramayu. Selain 2 kegiatan diatas, tim juga akan memberikan pendampingan kesiapan dokumen melalui pengukuran self assessment terhadap semua dimensi atau indikator yang akan di nilai nantinya oleh asesor/ penilai kementerian. Dengan lekukan pendampingan kegiatan pengukuran self kesiapan dokument maka secara otomatis desa pabean udik dapat mengetahui kekurangan atau kelebihan yang telah dilakukan untuk penerapan TIK di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan- 1 Forum Grup Discussion (FGD)

Kegiatan ini diawali dengan forum grup diskusi antara tim dan Pak Kuwu serta sekretarisnya untuk membahas terkait hal-hal apa saja yang akan menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang akan kami berikan terutama sesuai topik pembahasn terkait kesiapan tata kelola desa pabean udik. Berdasarkan pertemuan ini di dapat tanggal pelaksanaan dan kendala apa yang menjadi penghambat terkait pemeringkatan tersebut. Adapun hasil FGD diantaranya:

1. Adanya staff IT yang pindah sehingga butuh pendampingan terhadap web
2. Mengadakan sosialisasi terkait bagaimana mengelola web dalam rangka mendukung dimensi aplikasi dalam pemeringkatan PEGI
3. Masih belum bisa memenuhi 5 dimensi secara merata
4. Akan diadakan pelatihan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2023 yang akan datang



Gambar 1. Kegiatan FGD Tim PPDL dan Pak Kuwu serta Sekretaris Desa Pabean Udik

Kegiatan ke 2 - Pendampingan

Kegiatan selanjutnya setelah dilakukan FGD, Tim menyelenggarakan pendampingan pengukuran self assessment indikator PeGI serta workshop pengelolaan web dalam rangka percepatan pelayanan sebagai tindak lanjut pengukuran dimensi Aplikasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-19 Agustus 2023 yang diikuti oleh 8 Orang aparaturnya juga Sekretaris Pabean Udik.



Gambar 2. Kegiatan pendampingan dan Workshop Aplikasi Website Pabean udik

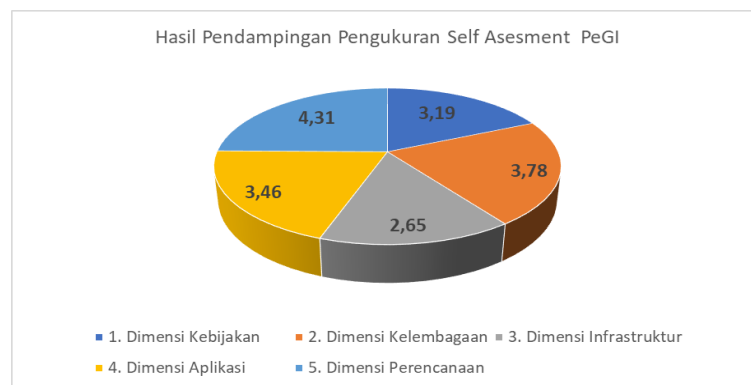
Dalam kegiatan ini kami menjelaskan terkait 5 indicator dimensi yang menjadi penilaian tata Kelola dalam pemerlingkatan PeGi ini meliputi:

- 1. Dimensi Kebijakan**, diantaranya landasan hukum / peraturan, evaluasi kebijakan, dokumen – dokumen kebijakan dan penetapan, peraturan yang diarsipkan secara baik di Website pabean udik. Pada dimensi ini juga perlunya Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengembangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan serta Pemberitahuan dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya yang perlu diketahui Masyarakat untuk dapat disampaikan secara terbuka atau transparan melalui aplikasi yang telah diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah seperti di laman website pabean udik atau kabupaten indramayu.
- 2. Dimensi Kelembagaan**, dimensi ini meliputi terkait struktur organisasi yang lengkap dan adanya Tupoksi berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK sehingga dapat menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik. Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian serta memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK di pabean udik.
- 3. Dimensi Infrastruktur**, dimensi ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK di pabean udik, Evaluasi dilakukan untuk mengukur terhadap: Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet), Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti lunak, Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook dan lain lain), Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon, sms dan lain lain dan terkait Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- 4. Dimensi Aplikasi**, Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office). Adapun evaluasi pada tahapan aplikasi diantaranya: ketersediaan dan penerapan aplikasi dalam menjalankan fungsi e-government yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah difasilitasi pemerintah daerah atau pusat. Aplikasi yang dievaluasi meliputi aplikasi Pelayanan meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain , Administrasi dan Manajemen meliputi aplikasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lainnya, administrasi Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan lain-lain. Evaluasi ini juga dilakukan untuk administrasi Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain juga mengukur administrasi Kepegawaian meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir pada aplikasi dimensi aplikasi terkait administrasi pada Pemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah juga tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah. Selain dimensi Aplikasi di atas

diukur juga terkait aplikasi di Masyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial juga terkait Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum yang ada di pabean udik maupun yang difasilitasi kabupaten Indramayu.

5. Dimensi Perencanaan, Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Adapun evaluasi yang dilakukan meliputi apakah ada proses perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, apakah ada kajian khusus terhadap kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya danantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang serta apakah telah menerapkan implementasi pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan yang mengacu pada rencana pengembangan baik secara berkala maupun jangka Panjang.

Berdasarkan indicator yang ada telah dibuatkan indicator self assessment sebagai pengukuran awal aparatur untuk mengukur kesiapan awal dalam pemeringaktan ini seperti terlihat pada tabel 1.



Gambar 3. Hasil pengukuran Awal Dimensi PeGI

Berdasarkan hasil yang didapat nilai terendah terlihat pada dimensi Infrastruktur nilai indikator 2,65 dan nilai tertinggi didapat pada diemnsi perencanaan yang sudah baik di nilai indicator 4,3 dari nilai tertinggi di 5 disetiap indicator dengan nilai kesesuaian di nilai 3 setiapp indikatornya.

Berdasarkan data hasil penilaian self assessment menjadi awal untuk desa pabean udik memperbaiki tata Kelola yang dinilai masih perlu perbaikan khususnya pada dimensi infrastruktur. Namun secara keseluruhan Pemenuhan Dimensi hasil self assessment sudah mulai terpenuhi. Harapannya mengacu pada hasil self assessment desa pabenan udik dapat memperbaiki dimensi yang masih dapat dimaksimalkan dan memperbaiki dimensi atau indicator yang masih kurang seperti pada dimensi Infrastruktur.



Gambar 4. Foto Bersama para peserta, Tim Pengabdian PPDL dan Mahasiswa

Akhir acara melakukan dokumentasi dnegan para peserta yang Sebagian sudah ada kegiatan lain sehingga tidak dapat hadir semua dalam foto Bersama. Tim juga melakukan evaluasi pelaksanaan melalui kuisisioner yang diberikan untuk mendapatkan umpan balik dari kegiatan pengamdian

Masyarakat yang telah dilakuakn Tim PPDL UPNVJ Bersama beberapa mahasiswa yang terlibat agar menjadi perbaikan dipelaksanaan Pengabdian selanjutnya.

Untuk mengukur pelaksanaan kegiatan ini, kami memberikan kuisisioner yang telah diisikan oleh para peserta dengan hasil evaluasi kegiatan ini mendapatkan respon positif dan peserta memahami dan mengerti makna dan maksud kegiatan pengabdian ini sehingga tujuan tim pengabdian kepada Masyarakat di desa pabean udik dapat sejalan dengan Tujuan Skema PPDL UPNVJ seperti terlihat pada gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4. Hasil evaluasi pelaksanaan Pendampingan oleh Tim PPDL

Berdasarkan hasil yang dicapai oleh Tim Pengabdian PPDL maka kegiatan pendampingan tata kelola pemerintahan ini telah sesuai capaian dneagn tujuan pelaksanaan kegiatan juga berkolerasi dneagn capaian IKU 5 terkait hasil kerja dosen penelitan / pengabdian yang digunakan Ooeh masyarakat dalam hal ini draft kebijakan IT dalam bidang Tatakelola pemerintahan serta keterlibatan mahasiswa dapat mendukung dalam pencapaian IKU 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus melalui keterlibatan sebagai pemdampingan kepada para aparatur Desa Pabean Udik sesuai peminatan mahasiswa yang diikutsertakan dalam Audit Sistem Informasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil workshop penyiapan dokuMen dan self assessment para aparatur pemerintah terhadap kesiapan yang dilakukan telah menunjukkan tahapan kesiapan dan pemahaman tata Kelola yang lebih baik. Hampir semua dimensi telah disiapkan dengan baik namun untuk indicator dimensi infrastruktur bernilai 2,65 masih perlu perhatian dari pemerintah desa untuk dapat diperbaiki lagi di masa yang akan datang. Hasil self assessment ini akan memberikan semangat kepada para petugas Desa pabean udik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem pemerintahan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta desa pabean udik dapat menjadi salah satu contoh untuk desa lainnya di Indramayu. Hal ini terlihat pada hasil self assessment untuk dimensi aplikasi mendapatkan nilai 3,46 dan perencanaan yang telah baik 4,71. Peningkatan ini masih self assessment dinilai oleh desa pabean udik namun untuk membuktikan kesiapan selanjutnya perlu penilaian dari pihak eksternal diluar pabean udik agar penilaian lebih mendekati penilaian real dari tim asesor kementerian.

SARAN

Untuk pengabdian selanjutnya, dapat lebih fokus terhadap kekurangan dalam kebijakan infrastruktur ataupun nilai yang belum maksimal dalam self assessment yang telah dilakukan agar pada periode peningkatan sesungguhnya pemerintah telah siap untuk 5 dimensi yang menjadi focus penilaian dan dapat menjadikan salah satu desa terbaik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengukuran Peningkatan Tata Kelola E-Government Analisis Dengan Metode Pegi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Sopiandi, Deffy Susanti, Wahyuno. Infotech journal <https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609> ISSN : 2460-1861
- Direktorat e-Government. (2011). Peningkatan eGovernment Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.

- Inpres No. 3 Tahun 2003. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment Indonesia.
- Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia.
- Melkior N. N. Sitokdana (2015). Jurnal Buana Informatika, Vol. 6, No.4, 2015, Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. DOI: <https://doi.org/10.24002/jbi.v6i4.461>
- Palvia Jain, Shailendra and Sharma S. Sushil. (2015). eGovernment and eGovernance : Scientific Journal of Informatic, Vol 2 No. 1.
- Deffy Susanti, Wahyuno (2022). Pengukuran Pemeringkatan Tata Kelola E-Goverment Analisis Dengan Metode Pegi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Sopiandi ., Infotech journal <https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609> ISSN : 2460-1861
- A Muliawati, T Rahayu, IH Indriana, K Kraugusteeliana (2022). Desain Tampilan aplikasi sistem Pelayanan Masyarakat Desa Dengan metode goal-directed design. Jurnal Ilmiah Matrik 23 (2), 229-238
- Pacific Council International Policy. (2012). Working Group on e-government in the Developing World, Roadmap for egovernment in the Developing World 10 Questions e-government Leaders Should Ask Themselves
- Ariyani, Pipin Farida. (2019). Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi, UI.
- MAK Harahap, K Kraugusteeliana dkk. (2023). The Role of Information Technology in Improving Urban Governance. Jurnal Minfo Polgan 12 (2), 371-379
- <https://signal.co.id/sosial/lakukan-pengabdian-kepada-masyarakat-upn-veteran-jakarta-sosialisasikan-e-government-di-desa-pabean-udik/>
- <https://www.journalnews.id/lakukan-abdimas-upn-veteran-jakarta-sosialisasikan-e-government-di-desa-pabean-udik/>
- Jurnal news. (2022, September). Diunduh dari <https://journalnews.id/ajak-perangkat-desa-manfaatkan-it-ilmu-komputer-upnvj-beri-pondampingan-tata-kelola-dan-peg-i-di-pabean-udik/> (4 Januari 2024)